

Standar Akuntansi Pemerintah, Sistem Informasi Akuntansi, dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan dengan Kompetensi Sumber Daya Manusia Sebagai Pemoderasi

Wiwiek Djumiyati¹, Khristina Yunita², Muhsin³, Angga P. Karpriana⁴, Rusliyawaty^{5*}

Universitas Tanjungpura

Email: wiwikdjumiyati@gmail.com, khristina.yunita@ekonomi.untan.ac.id,
muhsin@ekonomi.untan.ac.id, rusliyawaty@ekonomi.untan.ac.id*,
angga.permadi.k@ekonomi.untan.ac.id

Article History:

Received: 15 Oktober 2024

Revised: 10 November 2024

Accepted: 12 November 2024

Keywords: accounting standards, information systems, internal control

Abstract: The purpose of this study was to determine the influence of government accounting standards, accounting information systems, and internal control systems on the quality of financial reports with human resource competency as a moderator. This research uses quantitative methods and uses primary data. Determining the sample size in this study used a saturated sample. The population in this study was 40 employees, so the sample used was 40 employees. Research hypothesis testing was carried out using the Structural Equation Model (SEM) approach using Smart Partial Least Square (PLS) software version 3.0. The research results show that government accounting standards, accounting information systems, and internal control systems have a significant effect on the quality of financial reports. Government accounting standards and accounting information systems with human resource competence as a moderator have a significant effect on the quality of financial reports. And the internal control system with human resource competence as a moderator does not have a significant effect on the quality of financial reports.

PENDAHULUAN

Reformasi sektor publik yang disertai adanya tuntutan demokratisasi menjadi suatu fenomena global termasuk di Indonesia. Seiring dengan perkembangan zaman dan tuntutan era globalisasi saat ini yang tidak dapat dihindari, menuntut adanya suatu perubahan yang positif termasuk dalam kemajuan ekonomi suatu negara. Terutama dalam hal penyusunan, pengelolaan dan pelaporan akuntansi. Tentunya, dengan berdasarkan UU atau peraturan yang dibuat oleh Pemerintah/Kementerian Negara/Lembaga yang bersangkutan dan partisipasi atau kerjasama antara pemerintah Pusat dan Daerah beserta jajaran-jajarannya termasuk dalam hal ini lingkup Kepolisian Daerah Kalimantan Barat (Polda Kalbar).

Setiap entitas memiliki kewajiban untuk membuat laporan keuangan sesuai dengan peraturan

yang dibuat oleh pemerintah. Mengingat aktivitas yang dilakukan menggunakan dana publik, maka pertanggungjawaban atas pengelolaan dana tersebut menjadi tuntutan publik. Pengelolaan keuangan pada Satuan Kerja Bidang Keuangan Kepolisian Daerah Kalimantan Barat dilatarbelakangi oleh Peraturan Kapolri Nomor 5 tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Negara di Lingkungan Polri. Selain itu dalam hal pertanggungjawaban keuangan Satuan Kerja Bidang Keuangan Polda Kalbar dilatarbelakangi oleh Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan yang berbasis kas menuju akrual adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah.

Apabila informasi yang terdapat di dalam laporan keuangan pemerintah memenuhi kriteria karakteristik kualitatif laporan keuangan daerah seperti yang diisyaratkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, berarti pemerintah mampu mewujudkan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan. Informasi yang terkandung di dalam laporan keuangan yang dihasilkan oleh pemerintah harus sesuai dengan kriteria nilai informasi yang diisyaratkan oleh peraturan perundang-undangan. Apabila tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, maka akan mengakibatkan kerugian daerah, kekurangan penerimaan, kelemahan administrasi, ketidakekonomisan, ketidakefisienan, dan ketidakefektifan (Sugmaningrum, 2009).

Laporan keuangan sebagai informasi akuntansi diperlakukan sebagai alat pengambilan keputusan ekonomi dan penilaian kerja sehingga turut menentukan dapat tidaknya suatu organisasi terus berlanjut. Informasi akuntansi yang berkualitas membantu para pengguna informasi dalam membuat keputusan yang bermanfaat. Ketidaktepatan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan akan mengganggu kualitas laporan keuangan terutama aspek relevan dan andal.

Polda Kalimantan Barat merupakan sebuah Kementerian/Lembaga dan instansi pemerintahan dalam bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat. Dimana visi dari wilayah Polda Kalbar adalah terwujudnya pelayanan penyelidikan dan penyidikan yang profesional, prosedural, proposional, transparan, akuntabel dan dapat dipercaya masyarakat, guna tegaknya hukum dan keamanan di wilayah hukum Polda Kalimantan Barat. Optimalisasi dalam pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat tentu tidak terlepas dari ketersediaan anggaran yang dibutuhkan dalam satuan kerja Polri, agar dapat menjalankan rencana kerja yang telah disusun pimpinan Polri.

Berdasarkan observasi awal yang peneliti lakukan pada lingkungan Kepolisian Daerah Kalimantan Barat, terdapat berbagai permasalahan yang tentunya sebagai fenomena yang perlu untuk ditelaah dan dikaji secara mendalam, sebagai upaya memecahkan dan menyelesaikan permasalahan di lingkungan Kepolisian Daerah Kalimantan Barat, sehingga rencana kerja yang dilaksanakan satuan kerja Polri dapat berjalan dengan baik dan optimal.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Watopa *et al* (2023) adalah pada penelitian yang dilakukan Watopa menggunakan variabel penerapan sistem akuntansi keuangan daerah dan sistem pengendalian internal sedangkan dalam penelitian ini variabel yang digunakan adalah penerapan standar akuntansi pemerintah, sistem informasi akuntansi, dan sistem pengendalian internal. Perbedaan lain yang dibandingkan terhadap penelitian yang telah dilakukan Wahyuni (2021) dengan penelitian ini yaitu pada penelitian Restika objek penelitian yang digunakan adalah Pemerintahan Kabupaten Kuantan Singingi. Sedangkan pada penelitian ini menggunakan objek penelitian pada Polda Kalimantan Barat.

Beberapa faktor yang berperan dalam kualitas laporan keuangan sekaligus bahan kajian dalam penelitian ini adalah standar akuntansi pemerintah, sistem informasi akuntansi, sistem

pengendalian internal, serta kompetensi sumber daya manusia. Berdasarkan uraian diatas, maka penelitian ini mengambil judul “Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah, Sistem Informasi Akuntansi, dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan dengan Kompetensi Sumber Daya Manusia Sebagai Variabel Moderasi Pada Polda Kalbar.”

LANDASAN TEORI

Teri Keagenan (Agency Theory)

Teori keagenan mengungkapkan adanya hubungan kepentingan antara principal dengan agen. Principal merupakan pemilik perusahaan yang berwenang untuk memberikan perintah kepada agen, sedangkan agen merupakan manajer yang menerima perintah dari principal untuk mengelola perusahaan yang dilandasi oleh adanya pengendalian perusahaan, pemisahan penanggung resiko, pemisahan kepemilikan dan pengendalian perusahaan, serta pembuatan keputusan dan pengendalian fungsi-fungsi. Manajemen dalam melakukan aktivitas harus sesuai dengan perintah dari principal, akan tetapi biasanya manajer mempunyai tujuan sendiri untuk meningkatkan nilai perusahaan sehingga sering timbul suatu masalah. Masalah keagenan dapat muncul karena adanya perbedaan kepentingan antara principal dan agen (Jensen and Meckling, 1976).

Hubungan keagenan dalam organisasi sektor publik, seperti pemerintah daerah. Agen, yaitu Aparatur Sipil Negara (ASN) yang bertugas melakukan kegiatan pengelolaan keuangan daerah dan layanan publik, sedangkan prinsipal, yaitu masyarakat. Kepentingan agen dan prinsipal tidak selalu selaras, maka prinsipal menuntut agen untuk menyajikan laporan keuangan yang berkualitas. Kondisi ini sesuai dengan amanat PP No 22/PMK.05/2022 bahwa laporan keuangan pemerintah sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban pemerintah atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). Agen akan mengurangi konflik keagenan jika menyajikan laporan keuangan sesuai aturan dan standar akuntansi.

Kualitas Laporan Keuangan

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Pengertian Laporan Keuangan adalah laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan. Menurut Ikatan Akuntan Indonesia (IAI, 2014:7) menyatakan bahwa laporan keuangan merupakan bagian dari proses pelaporan keuangan. Laporan keuangan yang lengkap biasanya meliputi neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan posisi keuangan (yang disajikan dalam berbagai cara misalnya laporan arus kas, atau laporan arus dana), catatan dan laporan lain serta materi penjelasan yang merupakan bagian integral dari laporan keuangan.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintah bahwa kualitas laporan keuangan adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) disebutkan bahwa pengungkapan kebijakan akuntansi yang diterapkan akan membantu pembaca untuk dapat menghindari kesalahpahaman dalam membaca laporan keuangan. Pengungkapan kebijakan akuntansi dalam laporan keuangan dimaksudkan agar laporan keuangan dapat dimengerti.

Pengungkapan kebijakan tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan yang sangat membantu pemakai laporan keuangan, karena kadang-kadang perlakuan yang tidak tepat atau salah digunakan untuk suatu komponen laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas, atau laporan lainnya yang merupakan pengungkapan kebijakan akuntansi terpilih. Selain itu penetapan kebijakan akuntansi terpilih dimaksudkan untuk menjamin adanya keseragaman pencatatan dalam setiap transaksi akuntansi di setiap satuan kerja.

Standar Akuntansi Pemerintah

Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) merupakan standar akuntansi pertama di Indonesia yang mengatur mengenai akuntansi pemerintahan Indonesia. Sehingga dengan adanya standar ini, maka laporan keuangan pemerintah yang merupakan hasil dari proses akuntansi diharapkan dapat digunakan sebagai alat komunikasi antara pemerintah dengan *stakeholders* sehingga tercipta pengelolaan keuangan negara yang transparan dan akuntabel.

Standar Akuntansi Pemerintahan merupakan pedoman untuk menyatukan persepsi antara penyusun, pengguna, dan auditor. Pemerintah pusat dan pemerintah daerah wajib menyajikan laporan keuangan sesuai dengan SAP. Pengguna laporan keuangan termasuk legislatif akan menggunakan SAP untuk memahami informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dan eksternal auditor (BPK) akan menggunakan sebagai kriteria dalam pelaksanaan audit.

Standar Akuntansi Pemerintah menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 pasal 1 angka 3 disebutkan Standar Akuntansi Pemerintahan, yang selanjutnya disingkat SAP adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. Dalam Ketentuan Penutup Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 disebutkan bahwa pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku maka Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Penerapan SAP Berbasis AkruaI sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Pasal 4 ayat (1) dapat dilaksanakan secara bertahap dari penerapan SAP Berbasis Kas menuju AkruaI menjadi penerapan SAP Berbasis AkruaI.

Sistem Informasi Akuntansi

Sistem Informasi Akuntansi (SIA) merupakan sistem yang mengumpulkan, mencatat, menyimpan, dan memproses data sehingga menghasilkan informasi bagi para pengambil keputusan. Istilah sistem informasi akuntansi merupakan susunan sebagai dokumen, alat komunikasi, tenaga pelaksana, dan berbagai laporan yang didesain untuk mentransformasikan data keuangan menjadi informasi keuangan yang dibutuhkan pihak manajemen atau yang membutuhkannya. Dalam sistem informasi akuntansi ada beberapa karakteristik yang membuat suatu informasi berguna dan memiliki arti bagi pengambil keputusan yaitu relevan, andal, lengkap, tepat waktu, dapat dipahami dan diverifikasi.

Sistem informasi akuntansi berkenaan dengan transaksi keuangan yaitu transaksi yang diukur dalam bentuk uang. Sistem informasi akuntansi menggunakan kerangka kerja yang sangat terstruktur yang mencakup beberapa sub-sistem dan biasanya menggunakan akuntansi pemasukan ganda. Karena setiap transaksi keuangan mempertukarkan sesuatu nilai uang lainnya, maka transaksi mempunyai kegandaan dasar, yaitu ada sesuatu yang diberikan dan ada sesuatu yang diterima. Masing-masing setengah dari transaksi ini, apa yang diberikan dan apa yang diterima, dicatat secara terpisah dan diproses dengan cara yang berbeda dalam suatu sistem informasi akuntansi. Menurut (George, 2004) kualitas informasi pada umumnya dapat dikatakan bahwa informasi yang bernilai paling tinggi adalah informasi yang mengandung ketidakpastian paling rendah. Akan tetapi, informasi tidak dapat terbebas sama sekali dari unsur ketidakpastian. Oleh sebab itu, diperlukan perbandingan biaya untuk memperoleh informasi dengan manfaat yang diperoleh dengan adanya informasi itu sendiri.

Sistem Pengendalian Internal

Pengertian Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) tertuang pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 bahwa sistem pengendalian intern pemerintah adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus

menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Sistem pengendalian intern pemerintah, yang selanjutnya disingkat SPIP, adalah sistem pengendalian intern yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Sistem pengendalian intern pemerintah merupakan suatu cara untuk mengarahkan, mengawasi, dan mengukur sumber daya suatu organisasi, serta berperan penting dalam pencegahan dan pendeteksian digunakan dalam mencapai sasaran dan menjamin atau menyediakan informasi keuangan yang andal, serta menjamin ditaatinya hukum dan peraturan yang berlaku. Organisasi yang semakin besar dan kompleks serta perkembangan pesat teknologi informasi yang pada satu sisi memberikan keuntungan tetapi pada sisi lain juga meningkatkan risiko pengendalian dan keamanan sehingga mutlak diperlukan sistem pengendalian yang andal. Pengendalian intern diharapkan mampu mencegah atau mendeteksi terjadinya kesalahan dalam proses akuntansi serta dapat memberikan perlindungan bagi data organisasi dari adanya ancaman penyelewengan atau sabotase sistem.

Kompetensi Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia yang dimaksud di sini adalah pegawai yang kompeten di bidang akuntansi. SDM yang kompeten akan mampu memahami logika akuntansi dengan baik serta sumber daya manusia yang berpengalaman akan mampu bekerja dengan cepat, sebaliknya kegagalan SDM dalam memahami dan menerapkan logika akuntansi dapat menyebabkan kekeliruan dalam menyusun laporan keuangan dan ketidaksesuaian laporan keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Menurut Warisno dalam (Papilaya & Septarini, 2016).

Kompetensi sumber daya manusia adalah karakteristik yang dimiliki seseorang untuk mencapai kinerja yang tinggi dalam menjalankan tugas dan tanggungjawabnya yang diberikan kepadanya dengan bekal pendidikan, pelatihan, dan pengalaman yang cukup memadai serta memiliki ketrampilan, pengetahuan, dan kemampuan. Sumber daya manusia yang kompeten dibidangnya akan mampu memahami logika akuntansi dengan baik dan kemudian menggunakan pengetahuan dan pemahamannya dalam menyusun laporan keuangan sesuai dengan prinsip akuntansi dan aturan yang ditetapkan. Selain itu sumber daya manusia yang berpengalaman akan mampu bekerja dengan cepat, sehingga laporan keuangan yang dihasilkan bisa tepat waktu.

METODE PENELITIAN

Pendekatan penelitian ini berdasarkan pengukuran dan analisis data yang merupakan penelitian kuantitatif. Pengumpulan data menggunakan data primer, dengan teknik pengumpulan yaitu kuesioner. Penentuan jumlah sampel dalam penelitian ini menggunakan sampel jenuh. Populasi dalam penelitian ini berjumlah 40 pegawai, maka sampel yang digunakan adalah berjumlah 40 pegawai karena menggunakan sampel jenuh. Pengujian hipotesis penelitian dilakukan dengan pendekatan *Structural Equation Model* (SEM) dengan menggunakan *software Smart Partial Least Square* (PLS) versi 3.0.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif digunakan untuk memberikan gambaran mengenai variabel-variabel penelitian yang menunjukkan nilai maksimum, nilai minimum, nilai rata-rata dan standar deviasi dari setiap variabel pada penelitian ini. Statistik deskriptif yang diperoleh dari jawaban kuesioner

mengenai variabel penelitian disajikan dalam tabel dibawah ini.

Tabel 1 Statistik Deskriptif

Variabel Penelitian	N	Min	Max	Mean	Std. Deviation
Standar Akuntansi Pemerintahan (X1)	40	2,50	5,00	4,69	0,579
Sistem Informasi Akuntansi (X2)	40	2,00	5,00	4,66	0,668
Sistem Pengendalian Internal (X3)	40	2,44	5,00	4,66	0,622
Kualitas Laporan Keuangan (Y)	40	2,00	5,00	4,61	0,677
Kompetensi Sumber Daya Manusia (Z)	40	1,73	5,00	4,36	0,860

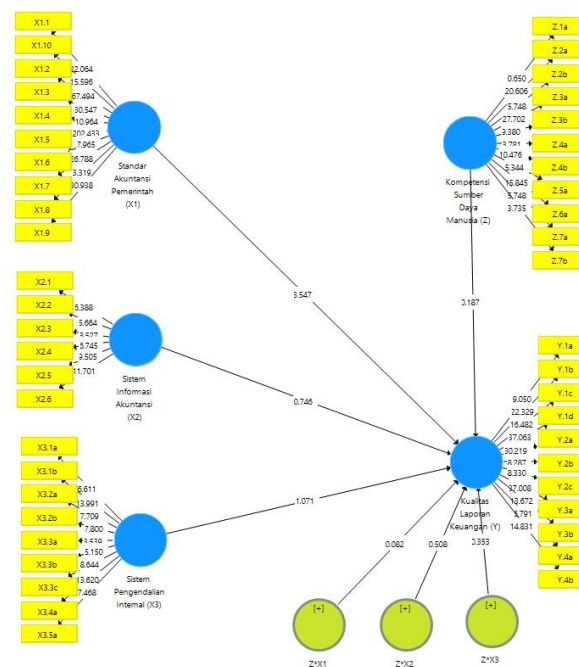
Hasil Uji Reliabilitas

Berdasarkan tabel di bawah ini dapat diketahui bahwa nilai *composite reliability* masing-masing konstruk berada di atas 0,7, sehingga dapat dinyatakan bahwa indikator yang digunakan dalam penelitian ini telah memenuhi reliabilitas yang baik (*reliabel*).

Tabel 2 Composite Reliability

Variabel	Composite Reliability	Keterangan
Standar Akuntansi Pemerintahan (X1)	0,977	Reliabel
Sistem Informasi Akuntansi (X2)	0,933	Reliabel
Sistem Pengendalian Internal (X3)	0,940	Reliabel
Kualitas Laporan Keuangan (Y)	0,981	Reliabel
Kompetensi Sumber Daya Manusia (Z)	0,920	Reliabel

Hasil Pengujian Model Struktural (*Inner Model*)



Gambar 1 Nilai Koefisien Path dan R-Square

Berdasarkan diagram jalur di atas dapat diketahui bahwa faktor yang paling dominan dalam mempengaruhi kualitas laporan keuangan (Y) adalah standar akuntansi pemerintah (Z) dengan koefisien jalur tertinggi sebesar 3,547. Berdasarkan gambar 1 tersebut, dapat dibentuk

persamaan struktural sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \text{Kualitas Laporan Keuangan} = & 3,547 \text{ Standar Akuntansi Pemerintahan} + 0,746 \text{ Sistem Informasi} \\ & \text{Akuntansi} + 1,071 \text{ Sistem Pengendalian Internal} + 0,187 \\ & \text{Kompetensi Sumber Daya Manusia} + 0,082 \text{ Kompetensi Sumber} \\ & \text{Daya Manusia*Standar Akuntansi Pemerintahan} + 0,508 \\ & \text{Kompetensi Sumber Daya Manusia*Sistem Informasi Akuntansi} + \\ & 0,353 \text{ Kompetensi Sumber Daya Manusia*Sistem Pengendalian} \\ & \text{Internal} \end{aligned}$$

Variabel standar akuntansi pemerintahan, sistem informasi akuntansi, sistem pengendalian internal, efek moderasi 1 (kompetensi sumber daya manusia*standar akuntansi pemerintahan), efek moderasi 2 (kompetensi sumber daya manusia*sistem informasi akuntansi), serta efek moderasi 3 (kompetensi sumber daya manusia*sistem pengendalian internal) memiliki koefisien yang positif. Hal ini berarti bahwa apabila variabel standar akuntansi pemerintahan, sistem informasi akuntansi, sistem pengendalian internal, efek moderasi 1 (kompetensi sumber daya manusia*standar akuntansi pemerintahan), efek moderasi 2 (kompetensi sumber daya manusia*sistem informasi akuntansi), serta efek moderasi 3 (kompetensi sumber daya manusia*sistem pengendalian internal) semakin meningkat, maka akan semakin meningkat pula kualitas laporan keuangan.

Hasil Uji *Effect Size* (f^2)

Hasil nilai *effect size* pada model penelitian ini, sebagai berikut.

$$f^2 = \frac{0,952 - 0,949}{1 - 0,952} = 0,0625$$

Berdasarkan hasil perhitungan *effect size* diatas, variabel kompetensi sumber daya manusia memberikan efek terhadap kualitas laporan keuangan senilai 0,0625, yang menunjukkan bahwa variabel pemoderasi pada model penelitian ini memberikan efek moderat / sedang karena nilainya berada di atas 0,02 dan kurang dari 0,35.

Hasil Uji *Prediction Relevance* (Q Square)

Hasil nilai Q Square pada model penelitian ini, sebagai berikut:

$$\begin{aligned} Q^2 &= 1 - (1 - 0,952) - (1 - 0,949) \\ &= 1 - 0,048 - 0,051 \\ &= 0,901 \end{aligned}$$

Berdasarkan hasil perhitungan Q square diatas, maka diperoleh Q^2 bernilai 0,901. Nilai Q^2 tersebut menunjukkan bahwa model variabel pemoderasi pada model penelitian ini memiliki *predictive relevance* kuat karena nilainya berada diatas 0,35.

Hasil Uji Hipotesis

Pengujian hipotesis dilakukan dengan melihat nilai T statistics yang dihasilkan dari proses *bootstrapping*. Hipotesis diterima (terdukung) jika nilai T statistics lebih besar dari 1,96 dengan signifikansi level 5% (*two tailed*) (Abdillah dan Jogiyanto, 2015). Hasil proses *bootstrapping* program *Smart PLS* dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 3 Nilai *T - Statistic*

Eksogen → Endogen	<i>Path Analysis</i>	<i>T Statistics</i>	<i>P Values</i>	Kesimpulan
Standar Akuntansi Pemerintah (X1) → Kualitas Laporan Keuangan (Y)	3,547	1,486	0,001	Diterima
Sistem Informasi Akuntansi (X2) → Kualitas Laporan Keuangan (Y)	0,746	0,802	0,042	Diterima
Sistem Pengendalian Internal (X3) → Kualitas Laporan Keuangan (Y)	1,071	1,066	0,006	Diterima
Kompetensi Sumber Daya Manusia (Z) → Penyerapan Anggaran (Y)	0,187	0,189	0,019	Diterima
Z*X1 → Kualitas Laporan Keuangan (Y)	0,082	0,079	0,039	Diterima
Z*X2 → Kualitas Laporan Keuangan (Y)	0,508	0,493	0,043	Diterima
Z*X3 → Kualitas Laporan Keuangan (Y)	0,353	3,486	0,802	Ditolak

Pengaruh Standar Akuntansi Pemerintah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan

Berdasarkan hasil *t* statistik $1,486 < 1,96$ serta nilai *p-value* $0,001 < 0,05$. Hasil pengujian menunjukkan bahwa standar akuntansi pemerintahan berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Berdasarkan hipotesis tersebut menunjukan bahwa Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan yang baik secara konsep dapat berperan untuk menghasilkan suatu laporan keuangan Polda Kalbar yang berkualitas yang ditandai dengan variabel adanya atau minimal kesalahan pencatatan, kecurangan, ketidak patuhan, terhadap hukum dan pada akhirnya diwujudkan dengan opini dari pihak (*BPK*), serta memenuhi kreteria kualitas relevan, andal, dapat dipercaya dan dibandingkan.

Berdasarkan teori keagenan (*agency theory*), dimana pegawai Polda Kalbar sebagai *agent* yang bertanggung jawab kepada *principal* menghasilkan laporan keuangan, untuk memenuhi kewajiban tersebut pihak *agent* harus mampu menyajikan laporan keuangan yang berkualitas, salah satu hal utama dalam pembuatan laporan tersebut adalah setiap pegawai pembuat laporan keuangan harus memahami standar akuntansi pemerintahan dengan baik sehingga mampu menghasilkan laporan keuangan yang akurat, andal, dapat di pertanggungjawabkan serta bisa menjadi informasi yang berguna bagi para pengguna laporan keuangan tersebut.

Pengaruh Sistem Informasi Akuntansi terhadap Kualitas Laporan Keuangan

Berdasarkan hasil *t* statistik $0,802 < 1,96$ serta nilai *p-value* $0,042 < 0,05$. Hasil tersebut menunjukan bahwa sistem informasi akuntansi berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan. Hal ini dapat disimpulkan bahwa ketika sistem informasi akuntansi yang diterapkan pada Polda Kalbar semakin baik, maka kualitas laporan keuangan Polda Kalbar akan semakin meningkat. Sistem informasi akuntansi juga bertujuan untuk mewujudkan fungsi analisis transaksi sampai dengan pelaporan keuangan di lingkungan pemerintah yang laporan keuangan itu pada akhirnya dapat menjadi suatu informasi untuk mengukur dan menilai kinerja pemerintah dalam rangka menggambarkan keberhasilan maupun kegagalan kinerjanya. Jadi, dengan adanya sistem informasi akuntansi dapat mempermudah dan mempercepat penyusunan laporan keuangan pada Polda Kalbar.

Berdasarkan teori keagenan (*agency theory*), dimana peran *agent* sebagai pihak yang bertanggung jawab kepada *stakeholder* harus menyajikan sebuah informasi yang akurat dan tepat waktu. Salah satu upaya yang dilakukan pihak *agent* adalah dengan pemanfaatan sistem informasi akuntansi, dengan sistem informasi yang terkomputerisasi dengan baik dan terintegrasi

dengan jaringan internet yang baik akan mampu menghasilkan informasi keuangan yang baik dan memenuhi karakteristik kualitatif sehingga informasi yang disajikan oleh agen dapat dipertanggung jawabkan kepada pihak pengguna laporan keuangan.

Pengaruh Sistem Pengendalian Internal terhadap Kualitas Laporan Keuangan

Berdasarkan hasil t statistik $1,066 < 1,96$ serta nilai p-value $0,006 < 0,05$. Hasil tersebut menunjukkan bahwa sistem pengendalian internal berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan. Hal ini dapat disimpulkan bahwa ketika sistem pengendalian internal yang diterapkan pada Polda Kalbar semakin baik, maka kualitas laporan keuangan Polda Kalbar akan semakin meningkat. Pengaruh sistem pengendalian internal yang signifikan terhadap kualitas laporan keuangan, memberi makna semakin meningkatnya penerapan sistem pengendalian internal maka diiringi juga dengan peningkatan kualitas laporan keuangan. Sistem pengendalian internal yang baik dapat mengurangi risiko terjadinya kekeliruan maupun kesalahan dalam menyusun laporan keuangan serta dengan adanya sistem pengendalian internal yang baik sangat berperan dalam upaya pencegahan dan pendeteksian tindak kecurangan atau penggelapan sehingga mampu menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas.

Berdasarkan teori keagenan (*agency theory*), dimana dalam *agency theory* terdapat *monitoring cost* yang merupakan biaya yang timbul dan ditanggung oleh *principal* untuk memonitor perilaku *agent*, yaitu untuk mengukur, mengamati, dan mengontrol perilaku *agent*. Hubungan *principal* dengan *agent* terjadi ketika pihak *principal* memberikan mandat kepada *agent* untuk memberikan laporan keuangan yang berkualitas yaitu laporan yang relevan, akurat, dan tepat waktu kepada pihak *principal*. Sistem pengendalian internal merupakan mekanisme *monitoring cost* karena dengan adanya pengendalian internal maka dapat dijadikan acuan oleh pihak *agent* agar tujuan *principal* dan *agent* dapat berjalan selaras.

Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia terhadap Kualitas Laporan Keuangan

Berdasarkan hasil t statistik $0,079 < 1,96$ serta nilai p-value $0,019 < 0,05$. Hasil tersebut menunjukkan bahwa kompetensi sumber daya manusia berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan. Hal ini dapat disimpulkan bahwa kompetensi sumber daya manusia pada Polda Kalbar semakin baik, maka kualitas laporan keuangan Polda Kalbar akan semakin meningkat. Keberhasilan suatu organisasi dalam mencapai suatu tujuan sangat ditentukan oleh kualitas dan kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berada di dalamnya. Dalam pengelolaan keuangan yang baik, harus memiliki sumber daya manusia yang kompeten, hal ini didukung dengan latar belakang pendidikan akuntansi, sering mengikuti pendidikan dan pelatihan, serta mempunyai pengalaman di bidang keuangan. Hal tersebut diperlukan untuk menerapkan sistem akuntansi yang ada agar dapat berjalan dengan efektif dan efisien serta menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas.

Berdasarkan teori keagenan (*agency theory*), dimana kompetensi sumber daya manusia dalam hal ini adalah berkaitan dengan pihak agen yang merupakan pihak pembuat laporan keuangan, haruslah memiliki kompetensi yang sesuai dengan yang dibutuhkan dalam pembuatan laporan keuangan, seperti telah mengerti peran dan fungsinya dalam pengelolaan keuangan, menjalankan tugas sesuai dengan fungsi akuntansi yang semestinya, mendapatkan pelatihan dalam penyusunan dan pembuatan laporan keuangan dan jika perlu sudah berpengalaman dalam bidang akuntansi sehingga dapat dengan mudah dalam pembuatan laporan keuangan yang berkualitas.

Pengaruh Standar Akuntansi Pemerintah dengan Kompetensi Sumber Daya Manusia

Sebagai Pemoderasi terhadap Kualitas Laporan Keuangan

Berdasarkan hasil t statistik $0,079 < 1,96$ serta nilai $p\text{-value}$ $0,039 < 0,05$. Hasil tersebut menunjukkan bahwa standar akuntansi pemerintahan dengan kompetensi sumber daya manusia sebagai pemoderasi berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan. Berdasarkan hasil analisis di atas, kompetensi sumber daya manusia memoderasi hubungan antara pemahaman standar akuntansi pemerintahan dengan kualitas laporan keuangan Polda Kalbar, dimana kompetensi sumber daya manusia memperkuat pengaruh pemahaman standar akuntansi pemerintahan terhadap kualitas laporan keuangan Polda Kalbar. Hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa kompetensi sumber daya manusia bertindak sebagai moderator yang memperkuat pengaruh pemahaman standar akuntansi pemerintahan terhadap kualitas laporan keuangan. Sebagai moderator kompetensi sumber daya manusia dapat berpengaruh secara langsung terhadap kualitas laporan keuangan.

Berdasarkan teori keagenan (*agency theory*), terdapat *bonding cost* yang merupakan biaya yang ditanggung oleh *agent* untuk menetapkan dan mematuhi mekanisme yang menjamin bahwa *agent* akan bertindak untuk kepentingan *principal*. Standar akuntansi pemerintah merupakan mekanisme *bonding cost* karena membutuhkan adanya suatu patokan dalam pemerintah agar *agent* dapat bertugas sesuai dengan kepentingan *principal*. Didukung dengan sumber daya manusia pegawai sebagai pihak agen yang kompeten mampu menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas dengan sistem akuntansi pemerintahan yang berjalan dengan cepat tepat serta efisien.

Pengaruh Sistem Informasi Akuntansi dengan Kompetensi Sumber Daya Manusia Sebagai Pemoderasi terhadap Kualitas Laporan Keuangan

Berdasarkan hasil t statistik $0,493 < 1,96$ serta nilai $p\text{-value}$ $0,043 < 0,05$. Hasil tersebut menunjukkan bahwa kompetensi sumber daya manusia memoderasi hubungan antara pemanfaatan teknologi informasi dengan kualitas laporan keuangan Polda Kalbar, dimana kompetensi sumber daya manusia memperkuat pengaruh pemanfaatan teknologi informasi terhadap kualitas laporan keuangan Polda Kalbar. Hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa kompetensi sumber daya manusia bertindak sebagai moderator yang memperkuat pengaruh pemanfaatan teknologi informasi terhadap kualitas laporan keuangan Polda Kalbar. Sebagai moderator kompetensi sumber daya manusia dapat berpengaruh secara langsung terhadap kualitas laporan keuangan.

Hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Khairudin (2017) menunjukkan bahwa kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif dan signifikan terhadap hubungan antara pengaruh pemanfaatan teknologi informasi dengan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Dapat dikatakan pula bahwa kompetensi sumber daya manusia yang didukung dengan teknologi informasi yang memadai, dapat meningkatkan kemampuan pengelolaan keuangan daerah dalam menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas. Penelitian yang dilakukan oleh Agustiawan dan Rasmini (2016) juga menunjukkan bahwa kompetensi sumber daya manusia mampu memoderasi pengaruh pemanfaatan teknologi informasi terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Berdasarkan teori keagenan (*agency theory*), dalam hal pemanfaatan teknologi informasi pihak agen sebagai pengelola keuangan haruslah bisa dan paham menggunakan sistem komputer, sehingga mempermudah dalam pengelolaan data transaksi keuangan sehingga laporan yang dihasilkan dan disajikan dalam sistem informasi terstruktur dan lebih cepat dan akurat.

Pengaruh Sistem Pengendalian Internal dengan Kompetensi Sumber Daya Manusia

Sebagai Pemoderasi terhadap Kualitas Laporan Keuangan

Berdasarkan hasil t statistik $3,486 < 1,96$ serta nilai p -value $0,802 < 0,05$. Hasil tersebut menunjukkan kompetensi sumber daya manusia tidak mampu memoderasi sistem pengendalian internal terhadap kualitas laporan keuangan Polda Kalbar. Kompetensi sumber daya manusia tidak memperkuat pengaruh sistem pengendalian internal terhadap kualitas laporan keuangan. Polda Kalbar memiliki sumber daya manusia yang berkompeten dalam pengelolaan keuangan sehingga sistem pengendalian internal yang telah disusun dengan baik tidak berjalan dengan optimal. Dapat dikatakan bahwa kompetensi sumber daya manusia bukan sebagai variabel pemoderasi tapi dapat sebagai variabel bebas, anteseden, maupun mediasi (Ghozali, 2018). Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian Sambuaga (2020) dimana kompetensi sumber daya manusia tidak mampu memperkuat hubungan sistem pengendalian internal terhadap kualitas laporan keuangan.

Berdasarkan teori keagenan (*agency theory*), dimana pegawai sebagai *agent* memiliki tanggung jawab kepada *principal* untuk memberikan kinerja dan pelayanan yang baik. Sistem pengendalian internal yang baik akan berpengaruh terhadap pencapaian kinerja organisasi tersebut. Apabila sistem pengendalian internal pada suatu organisasi dijalankan secara efektif dan efisien, serta sumber daya pegawai yang kompeten untuk menjalankan sistem pengendalian internal yang baik maka akan meningkatkan kualitas laporan keuangan organisasi tersebut. Namun, pada hasil penelitian ini tidak demikian, kompetensi sumber daya manusia tidak mampu memoderasi sistem pengendalian internal terhadap kualitas laporan keuangan Polda Kalbar.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis data dapat diperoleh hasil bahwa standar akuntansi pemerintah, sistem informasi akuntansi, sistem pengendalian internal, kompetensi sumber daya manusia sebagai pemoderasi standar akuntansi pemerintahan dan sistem informasi akuntansi secara simultan berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas laporan keuangan Polda Kalbar. Penerapan standar akuntansi pemerintahan yang baik, terstruktur dan sesuai dengan pedoman yang berlaku maka akan menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas. Penerapan sistem informasi akuntansi dapat meningkatkan akuntabilitas dan keandalan laporan keuangan sehingga mampu menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas serta bebas dari salah saji material. Selain itu, sistem pengendalian internal yang diterapkan dengan baik dan efektif, maka akan menghasilkan laporan keuangan yang mempunyai nilai informasi yang baik. Selain itu, kompetensi sumber daya manusia menunjukkan bahwasanya semakin tinggi kompetensi SDM pegawai yang dimiliki maka dapat menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas karena laporan keuangan telah disusun berdasarkan kemampuan yang memadai berdasarkan standar akuntansi pemerintah.

DAFTAR REFERENSI

- Agung, T. M., & Gayatri. (2018). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Karangasem. *E-Jurnal Akuntansi*, 1253.
- Almuntahanah & Samukri. 2019. Pengaruh Penerapan Sistem Informasi Akuntansi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan. *Jurnal Akuntansi* 8(2): 146 – 54.
- Anisma, Liza Rahayu Kennedy., & Yuneita. (2014). Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, dan Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah Pada Pemerintah Provinsi Riau (Studi Empiris Pada SKPD Provinsi Riau. *Jom Fekon* 1(2): 1

– 15.

- Cushing, Barry E. 1983. *Accounting Information and business Organization*, terjemahan Ruchyat Kosasih. Penerbit Erlangga : Jakarta. halaman 10, 11.
- George, H. Bodnar., & Hopwood, W. S. (2003). *Accounting Information System*, Terjemahan A.A Jusuf dan R. M Tambunan, edisi ke enam. Jakarta: Salemba Empat.
- George, M. Scott. (2004). *Prinsip-Prinsip Sistem Informasi Akuntansi*. Jakarta: PT. Raja Grafindo.
- Hasrian, Bustami, L., & Patra, A.D. (2015). Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal Akuntansi*, 2(1), 1 – 9.
- Ikatan Akuntan Indonesia. (2014). *Standar Akuntansi Keuangan*. Jakarta: Salemba Empat.
- Iswanto, J. (2017). Kompetensi, Profesionalisme Kerja, dan Kinerja Karyawan. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, 14(2), 184-191.
- Julita & Susilastri. (2018). Analysis Of Factor Affecting The Quality Of Government Financial Report Bengkalis Regency. *Jurnal International Journal Of Scientific & Technology Research*, 7(2), 157-164
- Krismiaji. 2015. *Sistem Informasi Akuntansi* edisi Keempat. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Mahayani, L., Sulindawati, N. L. G. E. D., & Marvilianti, P. E. D. (2017). Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia Bidang Akuntansi, Sistem Pengendalian Internal dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Studi Pada Koperasi Simpan Pinjam di Kabupaten Jembrana). *E-Journal SI Ak Universitas Ganesha Jurusan Akuntansi Program SI*, 8(2), 1 – 11.
- Mahmudi. (2010). *Manajemen Keuangan Daerah*. Jakarta: Erlangga.
- Miranti, A., & Mahardini, N. Y. (2018). Dampak Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Pada Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2015. *Jurnal Akuntansi*, 5(1), 22 – 32.
- Papilaya, F., & Septarini, D. F. (2016). Interaksi Komitmen Organisasi Terhadap Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal Ilmu Ekonomi & Sosial*, VII(2), 100 – 116.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2008 Tentang Pedoman Pelaksanaan Review atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintah.
- Rafid, R. Z. 2016. Pengaruh Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintahan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Dengan Kompetensi Sumber Daya Manusia Sebagai Variabel Moderasi (Studi Empiris Pada Pemerintah Kabupaten Bone). *Skripsi*. Universitas Islam Negeri Alauddin. Makassar. 4(1): 40 – 60.
- Riyadi, Wulan. 2020. Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi dan Pemahaman Akuntansi Pengaruhnya Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pada Koperasi Di Kabupaten Majalengka. *Jurnal Akuntansi Keuangan dan Sistem Informasi* 1(1).
- Setyowati, L., Istihika, W., & Pratiwi, R. D. (2016). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Semarang. *KINERJA*, Volume 20, No. 2, 179 – 191.
- Sugmaningrum, Puji Harto. (2009). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris Pada Pemerintah Kabupaten dan

- Kota Semarang). *Jurnal Akuntansi*, h.2.
- Sutrisno, & Widari, L. (2017). Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Pemerintah dan Komitmen Organisasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah. *Jurnal Ilmiah Ilmu Ekonomi*, 5(10), 117 – 126.
- Wahyuni, R. (2021). Pengaruh Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintahan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan dengan Kompetensi Sumber Daya Manusia Sebagai Variabel Moderasi (Studi Empiris Pada Pemerintahan Kabupaten Kuantan Singingi). *Journal-Universitas Islam Kuantan Singingi*, 505-517.
- Watopa, M. A., Kambu, A. A., & Ngutra, R. N. (2023). Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dengan Kompetensi Sumber Daya Manusia Sebagai Variabel Moderasi (Study Empiris Pada Kabupaten Waropen). *Jurnal Kajian Ekonomi & Keuangan Daerah*, Volume 8, Nomor 3, 354 – 367.
- Ubaidah, T. (2017). Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah, dan Good Governance Terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Studi Kasus pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Sragen). Skripsi. Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Widjanto, Nugroho. 2001. *Sistem Informasi Akuntansi*. Erlangga : Jakarta.